

**NEGOSIASI KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
DI KAWASAN WISATA DANAU TOLIRE  
KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA**

*Putrie Saridewi  
NPP 32.1029*

*Asdaf Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara  
Program Studi Politik Indonesia Terapan  
Email : [32.1029@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.1029@praja.ipdn.ac.id)*

*Pembimbing Skripsi : Dedy Pribadi Uang, S.STP., M.Si*

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** This research is motivated by a conflict related to water resource management in the Lake Tolire tourism area, located in Ternate City, North Maluku Province. The issue is marked by the disconnection of water supply to four houses of worship by the local water utility (PDAM) due to arrears in payment by the Tourism Office, even though the office had previously stated that water management in the tourism area was under its authority. The lack of studies that specifically address conflicts in water resource management at tourist sites and their resolution through negotiation mechanisms particularly in local contexts such as Ternate City highlights the urgency of this research. **Purpose:** This study aims to analyze the conflict in water resource management in the Lake Tolire tourism area and explain how the negotiation process was carried out as a form of conflict resolution between the disputing parties. **Method:** This research uses a qualitative approach, with data collection techniques including in-depth interviews and documentation. Informants were selected using purposive and snowball sampling techniques from 17 informants, namely the Secretary of the Ternate City Tourism Office, the Head of Takome, 3 (three) members of the Takome community forum, administrators of houses of worship, administrators of the Tolire Lake tourist destination, 5 (five) Takome residents, and 5 (five) visitors to the Tolire Lake tourist area in Ternate City. **Result:** The findings show that the conflict has occurred repeatedly (in 2019, 2022, and 2024), driven by weak communication and unclear responsibility for water payments. The negotiation process is categorized into three stages: pre-negotiation, negotiation implementation, and evaluation of the outcome. **Conclusion:** In conclusion, negotiation is an effective mechanism to reduce conflict and build agreements between the community and local government, although its implementation still requires stronger commitment from the involved stakeholders.

**Keywords:** conflict, conflict negotiation, water resources management, tolire lake tourism.

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik yang terjadi terkait pengelolaan sumber daya air di kawasan wisata Danau Tolire di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Permasalahan ini ditandai dengan pemutusan air di empat rumah ibadah oleh PDAM akibat tunggakan pembayaran dari Dinas Pariwisata, meskipun dinas tersebut sebelumnya menyatakan bahwa tanggung jawab air di kawasan wisata menjadi bagian dari kewenangannya. Minimnya studi yang secara khusus membahas konflik pengelolaan sumber daya air di kawasan wisata dan penyelesaiannya melalui mekanisme negosiasi, khususnya di konteks lokal seperti Kota Ternate, membuat penelitian ini menjadi urgensi dilakukannya penelitian ini. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik pengelolaan sumber daya air yang terjadi di kawasan wisata Danau Tolire serta menjelaskan bagaimana proses negosiasi dijalankan sebagai bentuk resolusi konflik antara pihak-pihak yang bersengketa. **Metode:** Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dan *snowball* sampling berupa 17 informan, yakni Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Ternate, Lurah Takome, 3 (tiga) anggota forum masyarakat Takome, pengurus rumah ibadah, pengurus destinasi wisata Danau Tolire, 5 (lima) warga Takome, dan 5 (lima) pengunjung wisata Danau Tolire Kota Ternate. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik telah terjadi secara berulang (tahun 2019, 2022, dan 2024) dan bersumber dari lemahnya komunikasi serta ketidakjelasan tanggung jawab pembayaran air. Proses negosiasi terbagi dalam tiga tahap: pra-negosiasi, pelaksanaan negosiasi, dan evaluasi hasil. **Kesimpulan:** Kesimpulannya, negosiasi merupakan mekanisme yang efektif dalam meredakan konflik dan membangun kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah daerah, meskipun implementasinya masih membutuhkan penguatan komitmen dari pihak terkait.

**Kata Kunci:** konflik, negosiasi konflik, pengelolaan sumber daya air, wisata danau tolire.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat esensial bagi keberlangsungan hidup dan ekosistem. Ketersediaan air bersih tidak hanya berperan dalam aspek biologis, tetapi juga sangat penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Karena itu, penyediaan dan pengelolaan air bersih menjadi salah satu prioritas kebijakan pemerintah, khususnya dalam mendukung keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor, termasuk sektor pariwisata (Weningtyas & Widuri, 2022).

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelesaian konflik, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam seperti air. Dalam konteks konflik pengelolaan sumber daya air di kawasan wisata Danau Tolire, prinsip negara hukum menuntut agar segala tindakan pemerintah, termasuk kebijakan pemutusan distribusi air oleh PDAM dan Dinas Pariwisata, harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjamin perlindungan hak warga negara (Jeddawi, 2011).

Kota Ternate dikenal sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam dan potensi wisata yang besar, salah satunya adalah Danau Tolire. Danau ini memiliki nilai ekologis, ekonomis, serta nilai

budaya dan mitos yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun nasional. Kawasan ini juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar yang bergantung pada aktivitas ekonomi di sektor pariwisata (Mahsya, 2024). Oleh karena itu, pengelolaan kawasan wisata, termasuk pengelolaan sumber daya air, menjadi sangat krusial dalam menjaga keberlanjutan destinasi tersebut.

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan air di kawasan wisata Danau Tolire mengalami sejumlah kendala serius. Salah satu permasalahan yang mencuat adalah pemutusan aliran air bersih oleh pihak PDAM terhadap empat rumah ibadah yang berada di sekitar kawasan wisata (Ariyanto, 2022). Pemutusan ini dipicu oleh tunggakan pembayaran yang menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata. Ironisnya, dinas tersebut sebelumnya telah menyatakan bahwa pemenuhan air bersih di kawasan wisata merupakan bagian dari kewenangannya. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan keresahan dan kemarahan masyarakat sekitar.

Puncak dari konflik ini terjadi pada bulan September 2024, ketika warga Kelurahan Takome yang tergabung dalam Forum Masyarakat Takome (FORMAT) melakukan aksi boikot dengan memblokir jalan menuju lokasi wisata Danau Tolire. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap lambannya respons pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang berdampak langsung terhadap fasilitas ibadah dan kenyamanan pengunjung. Selain mengganggu aktivitas wisata, kejadian ini juga mencerminkan kegagalan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat (Qal, 2024).

Masalah pemutusan air ini ternyata bukan kali pertama terjadi. Konflik serupa telah terjadi pada tahun 2019 dan 2022, menunjukkan bahwa permasalahan ini bersifat sistemik dan tidak ditangani secara tuntas. Hal ini menandakan adanya persoalan struktural dalam tata kelola pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan sumber daya air di kawasan wisata. Ketidakjelasan pembagian tanggung jawab antara instansi teknis, lemahnya pengawasan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan turut memperparah situasi.

Ketegangan antara masyarakat dan instansi pemerintah, seperti Dinas Pariwisata dan PDAM, tidak hanya mencerminkan persoalan teknis distribusi air, tetapi juga memperlihatkan bagaimana aktor-aktor lokal berinteraksi dalam ruang kebijakan yang dipengaruhi oleh kepentingan politik, legitimasi kekuasaan, serta respons terhadap tekanan sosial. Dalam konteks ini, keputusan pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan dari proses politik yang membentuknya, termasuk pertimbangan elektoral, relasi patron-klien, dan kapasitas institusional dalam merespons konflik secara adil dan berkelanjutan (Labolo, 2015). Dengan demikian, penyelesaian konflik pengelolaan air di kawasan wisata tidak hanya memerlukan pendekatan teknis, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap struktur dan dinamika pemerintahan lokal yang mempengaruhi praktik negosiasi di tingkat akar

Dalam konteks ini, negosiasi dipandang sebagai salah satu strategi penyelesaian konflik yang dapat memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat. Negosiasi memungkinkan dicapainya kesepakatan bersama tanpa harus memperuncing ketegangan (Asiah, 2017). Namun, mekanisme negosiasi yang berjalan di lapangan seringkali belum memenuhi prinsip partisipatif dan berkelanjutan, sehingga hasilnya tidak bertahan lama. Karena itu, dibutuhkan kajian akademik yang menganalisis bagaimana negosiasi diterapkan dalam kasus nyata seperti konflik pengelolaan air di Danau Tolire.

Gap penelitian muncul dari minimnya kajian ilmiah yang secara spesifik menyoroti konflik pengelolaan sumber daya air di kawasan wisata, terlebih dengan pendekatan resolusi konflik berbasis negosiasi dalam konteks lokal. Sebagian besar studi terdahulu lebih fokus pada konflik agraria, konflik antar lembaga, atau konflik antar masyarakat. Padahal, konflik berbasis layanan publik seperti air bersih di kawasan wisata memiliki implikasi langsung terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengisi kekosongan literatur sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata Kota Ternate, dalam menangani konflik serupa. Dengan pendekatan kualitatif dan teori negosiasi, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dinamika konflik dan strategi resolusinya, serta memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya tata kelola sumber daya air yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Kajian mengenai resolusi konflik telah banyak dilakukan di berbagai konteks, mulai dari konflik agraria, organisasi, hingga konflik sosial berbasis identitas. Berbagai studi sebelumnya umumnya menyoroti strategi negosiasi dalam konteks organisasi, pendidikan, dan konflik antar kelompok. Sebagai contoh, penelitian oleh (Fauzi et al., 2024) membahas negosiasi dalam konflik organisasi, sedangkan penelitian oleh (Kaisupy & Maing, 2021) mengkaji proses negosiasi dalam konflik politik di Papua. Penelitian lainnya oleh (Husni et al., 2024) menekankan pada pentingnya komunikasi strategis dalam menyelesaikan konflik agraria dan sosial berbasis keagamaan. Meskipun penelitian-penelitian tersebut memperkaya literatur mengenai resolusi konflik dan negosiasi, mayoritas di antaranya belum secara spesifik menyoroti konflik terkait pengelolaan layanan publik, terutama air bersih di kawasan wisata.

Sampai saat ini, sangat sedikit studi yang secara spesifik meneliti konflik pengelolaan sumber daya air dalam konteks kawasan wisata, terlebih lagi yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah daerah sebagai penyedia layanan. Padahal, layanan publik seperti penyediaan air bersih di ruang publik dan kawasan wisata merupakan isu yang sangat dekat dengan masyarakat, dan memiliki potensi konflik yang tinggi ketika pengelolaannya tidak transparan dan akuntabel.

Khususnya di Kota Ternate, belum ditemukan penelitian yang mendalami konflik antara warga dan Dinas Pariwisata terkait pemutusan air bersih di rumah ibadah yang berada dalam kawasan wisata Danau Tolire. Konflik yang terjadi sejak 2019 dan terus berulang hingga 2024 menunjukkan bahwa persoalan ini bersifat struktural dan memerlukan pendekatan resolusi yang lebih berkelanjutan, salah satunya melalui mekanisme negosiasi berbasis partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Penelitian ini secara spesifik mengkaji konflik pengelolaan sumber daya air di kawasan wisata Danau Tolire, dengan fokus pada proses negosiasi sebagai strategi penyelesaian konflik antara masyarakat dan Dinas Pariwisata. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan studi resolusi konflik berbasis pelayanan publik di tingkat lokal.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya menjelaskan mengenai hasil dari beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti oleh peneliti yang dijadikan bahan dan rujukan dalam

melakukan penelitian. Fokus dalam penelitian ini yakni negosiasi konflik dalam pengelolaan sumber daya air di kawasan wisata. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang penulis jadikan sebagai bahan referensi.

Pertama, Penelitian oleh Nurul Baridah et al, tahun 2024 yang berjudul “Strategi Negosiasi Dalam Menyelesaikan Konflik Organisasi” menemukan bahwa penyebab konflik dalam suatu organisasi sebagian besar disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang efektif, perbedaan kepentingan dan tujuan antar anggota. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, metode negosiasi diterapkan dengan pendekatan kolaboratif antara identifikasi sumber masalah yang menjadi konflik dan membuka dialog antar anggota sehingga mencapai kesepakatan yang disetujui sesuai dengan kepentingan bersama (Fauzi et al., 2024)

Sejalan dengan penelitian di atas, terdapat penelitian oleh Ansori et al, tahun 2024 berjudul “Konflik dan Negosiasi Dalam Organisasi” penelitian ini juga membahas mengenai bagaimana suatu konflik itu terjadi dalam organisasi dan negosiasi sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan konflik tersebut. Negosiasi dilakukan dengan diskusi antara pihak yang berkonflik sehingga dapat mencapai kesepakatan bersama (Ansori Ansori et al., 2024). Selain itu terkait masalah konflik dalam organisasi juga dibahas dalam penelitian Weldia dan Ahmadi tahun 2024 yang berjudul “Konflik dan Perlunya Negosiasi Dalam Organisasi”, penelitian ini mengkaji bagaimana pentingnya negosiasi dalam suatu organisasi guna menyelesaikan konflik yang terjadi, negosiasi tersebut dilakukan dengan membangun hubungan yang harmonis antara anggota serta menciptakan keputusan yang saling menguntungkan karena setiap anggota memiliki kepentingan yang berbeda (Atmanegara & Ahmadi, 2024). Penelitian di atas sama-sama membahas tentang bagaimana negosiasi berperan dalam konflik yang terjadi di dalam organisasi.

Dalam penelitian oleh Khidayat dan Yustika, tahun 2024 berjudul “Analisis Teori Konflik: Strategi Negosiasi Sebagai Solusi Efektif Dalam Manajemen Organisasi Di SD It An-Nahar” menganalisis bagaimana teori konflik digunakan untuk menghasilkan strategi negosiasi sebagai penyelesaian yang efektif untuk konflik yang terjadi di Sekolah Dasar. Hasilnya strategi negosiasi yang paling efektif yakni negosiasi kolaboratif yang dapat menyelesaikan persoalan dan menghasilkan solusi yang saling menguntungkan bagi hubungan antar pihak (Muslim & Prayoga, 2024). Kemudian ada penelitian serupa yang membahas strategi negosiasi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di sekolah, yakni penelitian yang dilakukan oleh Akmal Al-Hasyimy, tahun 2024 dengan judul “Strategi Negosiasi dalam Menyelesaikan Konflik di Sekolah”. Penelitian itu menunjukkan upaya untuk menyelesaikan konflik di sekolah dapat dilakukan ketika akar masalah dari konflik sudah diketahui secara pasti, sehingga strategi negosiasi dapat diterapkan untuk menyelesaikan konflik tersebut (Al-Hasyimy, 2024). Kedua penelitian tersebut memiliki beberapa kesamaan yakni subjek penelitian yang dilakukan di sekolah, juga penelitian tersebut berfokus pada strategi negosiasi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.

Penelitian selanjutnya berjudul “Komunikasi Strategis Lobi Dan Negosiasi Dalam Upaya Peredaman Konflik Agraria Desa Pakel, Banyuwangi” oleh Razali Husni, et al, tahun 2024 mengemukakan bahwa untuk mengatasi konflik agraria yang terjadi, strategi lobi dan negosiasi bisa dijalankan dengan penerapan beberapa tahapan komunikasi strategis (Husni et al., 2024). Sejalan dengan itu, ada penelitian oleh Maria Junita, et al, tahun 2024 berjudul “Strategi Lobi dan Negosiasi dalam Penyelesaian Konflik Sosial: Studi Kasus Penolakan Pembangunan Gereja HKBP di Cilegon, Indonesia” juga membahas bagaimana strategi lobi dan negosiasi dapat menyelesaikan konflik dalam kasus penolakan pembangunan gereja. Tentunya proses lobi dan negosiasi dalam

konflik ini melibatkan banyak pihak dan memakan waktu panjang, namun pada akhirnya pihak yang terlibat mengizinkan pembangunan gereja tersebut (Simarmata et al., 2024). Kedua penelitian tersebut saling berkaitan karena sama-sama membahas strategi untuk menyelesaikan suatu konflik dapat dilakukan dengan menerapkan strategi lobi dan negosiasi agar permasalahan yang ada dapat diredam dan solusi baru ditemukan.

Penelitian lain berjudul “Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua” oleh Devia dan Skolastika, tahun 2021, menemukan solusi untuk mengatasi konflik yang terjadi selama 50 tahun tersebut. Solusi tersebut yakni negosiasi yang dianggap sebagai alternatif paling efektif untuk mendapatkan kesepakatan yang disetujui kedua pihak. Proses negosiasinya antara lain mengidentifikasi aktor dalam konflik, tuntutan aktor, dan kemudian menjalankan negosiasi (Kaisupy & Maing, 2021). Terdapat penelitian lain berjudul “Konflik Antar Warga Di Kecamatan Pulau Ternate (Studi Tentang Negosiasi Tapal Batas Antara Kelurahan Sulamadaha Dan Kelurahan Takome)” oleh Vivi dan Shawwir, tahun 2022. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui konflik yang terjadi dan bagaimana negosiasi yang dibangun untuk mengatasinya. Proses negosiasi dibangun oleh pihak kesultanan Ternate dengan beberapa penawaran, akan tetapi pada akhirnya masalah ini diserahkan kepada pemerintah Kota Ternate untuk menentukan tapal batas kedua wilayah tersebut (Noviyanti & Shawwir, 2022). Kedua penelitian di atas, pada dasarnya menggunakan metode negosiasi dengan melibatkan aktor internal dan eksternal agar permasalahan yang terjadi bisa ditemukan solusi sesuai keinginan masing-masing pihak.

Beragamnya konflik yang terjadi, penulis menemukan ada satu penelitian mengenai konflik perebutan mayat oleh Faisal Saleh, et al, tahun 2024 berjudul “Resolusi Konflik Perebutan Mayat: Negosiasi Antaragama Di Sentani, Papua” memfokuskan pada konflik keluarga yang berbeda keyakinan di Sentani yang terjadi pada proses pemakaman. Penelitian ini bertujuan untuk memahami salah satu strategi negosiasi yaitu power sharing untuk meredakan konflik semacam ini. Nyatanya, negosiasi semacam itu dilakukan dengan mengadakan mediasi, komunikasi terbuka dan kerja sama antara pemerintah dan organisasi keagamaan (Saleh et al., 2024). Penelitian ini menghadirkan teori negosiasi yang berbeda, yakni negosiasi power sharing, yang mana proses tersebut mengadakan mediasi, komunikasi, dan kerja sama antara pemerintah dan organisasi keagamaan untuk mengatasi permasalahan keagamaan yang terjadi dalam sebuah keluarga.

Dalam penelitian Fan et al. (2025), negosiasi dalam konflik sumber daya air dianalisis melalui pendekatan teori permainan dengan mempertimbangkan biaya negosiasi dan kecenderungan risiko para aktor yang terlibat. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan resolusi konflik sangat ditentukan oleh kemampuan pihak-pihak untuk mencapai titik temu yang rasional dan berkeadilan melalui proses negosiasi yang efisien (Fan et al., 2025). Dalam konteks Danau Tolire, konflik antara masyarakat dan pemerintah terkait pemutusan akses air juga menunjukkan adanya ketegangan kepentingan dan persepsi ketidakadilan, sehingga pendekatan negosiasi berbasis kalkulasi biaya sosial dan politik menjadi relevan sebagai alternatif penyelesaian yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, dinamika serupa juga ditemukan dalam studi Lucy dan Andreas (2018) tentang konflik pengelolaan air di Bali yang muncul akibat ekspansi sektor pariwisata. Mereka menunjukkan bahwa pertumbuhan pariwisata dapat memperparah krisis air jika tidak diiringi dengan perencanaan tata kelola yang sensitif terhadap kebutuhan lokal dan daya dukung lingkungan (Lucy & Andreas, 2018). Ini memperkuat relevansi kasus Danau Tolire sebagai kawasan wisata yang diwarnai konflik antara kebutuhan pelestarian, pelayanan publik, dan

kepentingan ekonomi. Ketika pemerintah daerah lebih menekankan sektor pariwisata namun mengabaikan hak dasar warga terhadap air bersih, potensi konflik sosial pun meningkat dan menuntut penanganan yang adil dan inklusif.

Sebagai penegas, penelitian dari Katz dan Nagabhatla (2023) menekankan pentingnya pendekatan pencegahan konflik berbasis partisipatif dalam tata kelola air. Strategi seperti keterlibatan masyarakat secara aktif, transparansi informasi, dan pembentukan forum bersama terbukti efektif dalam meredam eskalasi konflik dan membangun kepercayaan antar pihak (Katz & Nagabhatla, 2023). Prinsip-prinsip ini sejalan dengan kebutuhan di kawasan Danau Tolire, di mana penyelesaian konflik harus diarahkan pada kolaborasi yang mengedepankan dialog terbuka antara warga, PDAM, dan Dinas Pariwisata. Dengan demikian, pembelajaran dari ketiga jurnal ini menegaskan bahwa negosiasi yang adil, perencanaan tata kelola yang inklusif, dan partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci utama dalam resolusi konflik pengelolaan sumber daya air di wilayah wisata seperti Danau Tolire.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan negosiasi konflik, memiliki perbedaan yang cukup besar dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaan yang ada hanya terletak pada metode penelitian yakni metode penelitian kualitatif dengan penyajian secara deskriptif. Sedangkan perbedaan penelitian yang terlihat yakni perbedaan pada tujuan penelitian, tahun penelitian, lokasi penelitian, serta teori yang digunakan dalam penelitian.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis belum menemukan penelitian yang meneliti tentang negosiasi konflik pemutusan sumber daya air khususnya di kawasan wisata di Kota Ternate. Penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis berfokus pada negosiasi sebagai penyelesaian konflik terkait pemutusan sumber daya air di kawasan wisata yang berlokasi di Kota Ternate, dimana konflik yang terjadi yakni antara warga setempat dengan Dinas Pariwisata Kota Ternate. Lokasi penelitian ini yaitu di Kota Ternate, dengan berfokus pada Dinas Pariwisata dan Kelurahan Takome, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berfokus pada bagaimana konflik pada pengelolaan sumber daya air terjadi di kawasan wisata Danau Tolire Kota Ternate dan bagaimana pihak-pihak terkait menyelesaikan konflik tersebut dengan menggunakan negosiasi sebagai metode penyelesaian konflik. Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yakni pada objek penelitian dan fokus penelitian, di mana penelitian ini berfokus pada konflik yang terjadi dan negosiasi dari konflik tersebut, kemudian untuk objek penelitian yakni terkait konflik pengelolaan sumber daya air yang terjadi di kawasan wisata Danau Tolire di Kota Ternate. Selain itu, landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian lain, yang mana pada penelitian ini penulis berlandaskan pada dua teori, yang pertama teori konflik dari Galtung (1996) yang memperkenalkan teori segitiga konflik, kemudian teori yang kedua yakni teori negosiasi dari Patrice Lumumba (2013), yang menjelaskan bahwa negosiasi dilakukan melalui tiga tahapan, yakni pra negosiasi, proses negosiasi dan evaluasi.

#### **1.5 Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konflik pengelolaan sumber daya air yang terjadi di kawasan wisata Danau Tolire Kota Ternate dan menganalisis metode penyelesaian

konflik berupa negosiasi untuk menyelesaikan konflik terkait pengelolaan sumber daya air yang terjadi kawasan wisata Danau Tolire Kota Ternate.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan sudut pandang para pelaku atau subjek yang terlibat (Simangunsong, 2017). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam proses negosiasi konflik pengelolaan sumber daya air antara masyarakat dan pemerintah daerah di kawasan wisata Danau Tolire, Kota Ternate. Penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggali dinamika sosial, pengalaman, serta perspektif para aktor yang terlibat dalam konflik dan proses penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan dua teori, yakni teori konflik oleh Galtung, (1996) yang menjelaskan bagaimana konflik bisa hadir mulai dari adanya pertentangan, munculnya sikap, dan adanya perilaku sebagai puncak konflik, kemudian teori negosiasi oleh Lumumba, (2013) yang menjelaskan bagaimana negosiasi digunakan sebagai penyelesaian konflik melalui tiga tahap yaitu pra negosiasi, proses negosiasi dan evaluasi. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan dua cara yakni wawancara secara langsung, dan dokumentasi, dalam pengumpulan data melalui wawancara, penulis melakukan wawancara terhadap 17 informan, yakni Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Ternate, Lurah Takome, 3 (tiga) anggota forum masyarakat Takome, pengurus rumah ibadah, pengurus destinasi wisata Danau Tolire, 5 (lima) warga Takome, dan 5 (lima) pengunjung wisata Danau Tolire Kota Ternate.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Konflik Pengelolaan Sumber Daya Air yang Terjadi di Kawasan Wisata Danau Tolire Kota Ternate

Konflik pengelolaan sumber daya air di kawasan wisata Danau Tolire, Kota Ternate, adalah salah satu permasalahan yang telah lama mengemuka. Permasalahan ini menciptakan ketegangan yang signifikan antara berbagai pihak yang terlibat, terutama masyarakat sekitar dan Dinas Pariwisata. Dari hasil pengumpulan data di lapangan, dapat didefinisikan bahwa konflik ini telah berdampak signifikan pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Situasi ini berangkat dari pemutusan pasokan air yang dilakukan oleh PDAM, yang dipicu oleh adanya tunggakan pembayaran oleh Dinas Pariwisata.

#### 3.1.1 *Contradictions* (Pertentangan)

Tahap ini merupakan awal kejadian yang memicu timbulnya konflik atau disebut dengan sumber konflik dimana terdapat beberapa indikator yang akan dibahas yakni kapan awal mula konflik terjadi dan apa penyebab atau akar masalah dari konflik ini.

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa narasumber terkait, konflik ini terjadi pada bulan September 2024 lalu., akan tetapi awal mula konflik ini terjadi sudah terjadi semenjak tahun 2017 silam.

Konflik ini diawali dengan kejadian pemutusan air oleh PAM di beberapa tahun silam, yakni pada tahun 2019. Konflik ini bukan hal yang baru, tetapi karena adanya kejadian pemutusan yang dilakukan dari beberapa tahun belakangan, akhirnya memicu timbulnya konflik yang terjadi pada bulan September tahun 2024. Selanjutnya untuk penyebab dari konflik ini dikarenakan

adanya tunggakan pembayaran air oleh pihak Dinas Pariwisata kepada pihak PAM, hal ini yang kemudian menyebabkan PAM melakukan pemutusan air di 4 (empat) rumah ibadah yang ada di kawasan wisata di Kelurahan Takome tersebut.

Penyebab dari konflik ini yakni karena adanya tunggakan pembayaran dari Dinas Pariwisata kepada pihak PAM, karena berdasarkan kesepakatan awal, tanggungjawab atas pengaliran air di rumah ibadah di Takome itu diambil alih oleh Dinas Pariwisata. Akan tetapi karena adanya tunggakan pembayaran akhirnya pihak PAM pun memutuskan aliran air, hal ini kemudian memicu konflik yang puncaknya berupa pemboikotan jalan menuju Wisata Danau Tolire terjadi pada bulan September 2024 lalu.

### **3.1.2 Attitudes (Sikap)**

Sikap atau attitudes yang dimaksud di dalam elemen ini adalah respon yang muncul di antara kedua pihak ketika konflik ini terjadi yakni sikap yang ditunjukkan oleh kedua pihak yang berkonflik. Dalam teori ini membahas satu pertanyaan yakni apa yang dilakukan warga ketika konflik mulai muncul. Sikap atau respon yang timbul dari permasalahan ini yakni adanya banyak keluhan dari warga Kelurahan Takome, hal ini dikarenakan banyak dampak negatif yang timbul akibat dari pemutusan air, yang utamanya adalah masyarakat menjadi kesulitan untuk menjalankan ibadah karena tidak bisa mengambil air wudhu untuk sholat dan keperluan lainnya.

### **3.1.3 Behaviors (Perilaku)**

Perilaku atau behaviors di sini memiliki makna yang mengarah pada tindakan nyata yang dilakukan di puncak konflik yang terjadi. Tindakan ini dapat beragam, bisa berupa kekerasan, agresi ataupun serangan verbal.

Di dalam kasus ini, tindakan yang muncul akibat dari aksi pemutusan air oleh PAM yakni adanya aksi pemboikotan yang dilakukan warga di tempat wisata Danau Tolire lebih tepatnya di jalur jalan masuk menuju wisata Danau Tolire. Aksi pemboikotan tersebut akhirnya ditindaklanjuti oleh pihak penengah dan pihak Dinas Pariwisata dengan meminta agar para warga dapat tenang dan menyatakan bahwa pihak Dinas akan segera menindaklanjuti pemutusan air tersebut dengan segera.

Akibat dari aksi tersebut menimbulkan dampak yang negatif bagi lingkungan sekitar terutama wisatawan yang datang berkunjung ke tempat wisata Danau Tolire, hal tersebut mengganggu wisatawan karena jalan depan menuju tempat wisata tidak dapat dilewati karena aksi boikot tersebut. Jika hal ini terjadi secara berkelanjutan dan tidak segera ditindaklanjuti, maka dampak terbesar ada pada pengelolaan wisata Danau Tolire. Pengelolaan wisata akan terganggu karena retribusi masuk terblokir, dan secara tidak langsung juga berdampak pada pemasukan pemerintah daerah bidang Pariwisata yakni Dinas Pariwisata itu sendiri.

## **3.2 Analisis Negosiasi Konflik Pengelolaan Sumber Daya Air di Kawasan Wisata Danau Tolire Kota Ternate**

Analisis negosiasi konflik pengelolaan sumber daya air di kawasan wisata danau tolireakan berfokus pada bagaimana konflik ini diselesaikan melalui suatu proses negosiasi. Melalui pendekatan negosiasi, analisis ini akan mengidentifikasi bagaimana proses komunikasi dan interaksi antar aktor dalam mencaai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang berkonflik, yakni masyarakat dan Dinas Pariwisata.

Analisis ini akan menggunakan teori dari Patrice Lumumba (2013), yang menjelaskan bahwa negosiasi berfokus pada strategi untuk menyelesaikan masalah yang ada secara damai dan menghasilkan solusi yang sama-sama menguntungkan bagi kedua pihak yang berkonflik. Proses negosiasi tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yakni pra-negosiasi, proses negosiasi, dan evaluasi.

### 3.2.1 Pra-Negosiasi

Dalam proses pra-negosiasi ini menjelaskan mengenai kesepakatan awal yang dilakukan sebelum adanya proses negosiasi dan adanya kesepakatan prosedur yakni tentang kapan dan di mana negosiasi akan dilaksanakan serta apakah negosiasi akan dilakukan secara tertutup atau terbuka.

#### a. Kesepakatan awal

Untuk negosiasi sebuah langkah penting yang diambil oleh para pihak terkait untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan sumber daya air di kawasan wisata. Dalam konteks ini, kesepakatan tersebut bertujuan untuk memastikan pasokan air ke rumah ibadah tetap berjalan lancar agar kegiatan masyarakat dan wisatawan tidak terganggu dan berjalan baik.

Dengan adanya kesepakatan awal, maka kedua pihak telah menunjukkan sikap positif untuk melanjutkan proses negosiasi karena sudah ada titik terang dari permasalahan yang terjadi. Artinya, pihak yang berkonflik memiliki kemauan untuk melaksanakan negosiasi untuk menyelesaikan masalah atau konflik.

Kesepakatan ini merupakan konsensus awal yang berhasil dicapai, tidak hanya penting dari segi operasional tetapi juga menciptakan rasa saling percaya di antara kedua pihak tersebut. Kesiapan untuk mencari solusi bersama dan kejelasan terkait pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan air ini menjadi modal utama dalam menghadapi tantangan yang akan muncul di masa mendatang atau selama proses negosiasi dilaksanakan.

#### b. Kesepakatan prosedur

Kapan dan di mana negosiasi dilakukan merupakan salah satu aspek penting dalam konteks pembahasan ini. Berdasarkan hasil wawancara, negosiasi ini dilaksanakan dalam sekali pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Takome pada tanggal 15 November 2024 sebelum pilkada serentak dan dihadiri oleh beberapa pihak terkait. Hal ini menjelaskan bahwa pemilihan waktu dan tempat pelaksanaan negosiasi dilakukan secara strategis untuk menjamin kehadiran seluruh pihak yang terlibat serta memastikan bahwa masalah yang dihadapi dapat diselesaikan sebelum pelaksanaan pilkada yang dapat menimbulkan dinamika politik lebih lanjut.

Sebagaimana ditekankan, negosiasi ini dilakukan dengan tatap muka untuk memastikan transparansi dan saling pengertian antara semua pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan keseriusan dan komitmen dari pihak Dinas Pariwisata serta warga dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, dengan Lurah yang bertindak sebagai fasilitator yang netral dalam proses tersebut.

Selanjutnya terkait pelaksanaan negosiasi, kesepakatan yang terjadi yakni negosiasi dilakukan secara tertutup dengan melibatkan perwakilan dari masing-masing pihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses negosiasi yakni forum masyarakat Takome, pihak Dinas Pariwisata, dan ada Lurah sebagai penengah dalam proses negosiasi. Negosiasi tertutup ini memungkinkan dialog yang efektif dengan mengurangi tekanan eksternal yang tidak diinginkan dan berpotensi megaburkan tujuan akhir dari negosiasi ini.

### 3.2.2 Proses Negosiasi

Proses negosiasi menjelaskan dua indikator yakni tahapan persiapan dan kegiatan negosiasi. Untuk tahapan persiapan akan membahas strategi sebelum negosiasi, apakah pihak-pihak terkait bersedia melakukan negosiasi, kemudian untuk kegiatan negosiasi membahas mengenai bagaimana proses negosiasi dilakukan dan upaya untuk mencapai titik temu di akhir negosiasi.

#### a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, pihak-pihak yang akan bernegosiasi melakukan berbagai persiapan untuk memastikan bahwa proses negosiasi dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang optimal. Dalam menyiapkan suatu negosiasi, tentunya kesediaan para pihak untuk bernegosiasi sangat berpengaruh terhadap jalannya proses negosiasi.

Dalam hal ini, pendekatan secara persuasif yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atau pihak penengah memberikan dampak yang positif terhadap kesediaan pihak-pihak untuk terlibat dalam negosiasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kesediaan pihak untuk terlibat dalam negosiasi sangat bergantung pada bagaimana cara pihak yang berkepentingan melakukan pendekatan, cara berkomunikasi, dan strategi yang digunakan.

Selain kesediaan para pihak untuk melakukan negosiasi, terdapat langkah lain dalam proses persiapan negosiasi, yakni pengumpulan informasi mengenai masalah, penentuan kepentingan dari masing-masing pihak yang berkonflik, serta strategi yang akan digunakan dalam proses negosiasi.

Dari hasil wawancara dan penelitian yang telah dilakukan, masalah yang terjadi yakni adanya pemutusan aliran air di 4 (empat) rumah ibadah yang berlokasi di kawasan wisata Danau Tolire, yakni 3 (tiga) mushalla dan 1 (satu) masjid. Pemutusan ini disebabkan karena adanya tunggakan pembayaran oleh Dinas Pariwisata kepada pihak PAM (Perusahaan Air Minum) Kota Ternate. Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan dari Dinas Pariwisata bahwa pengelolaan air menjadi tanggung jawab pihak Dinas, maka masyarakat juga berharap pihak Dinas segera menindaklanjuti permasalahan ini, akan tetapi masalah ini tidak segera ditindaklanjuti, malah dibiarkan selama beberapa waktu.

Terkait kepentingan dari masing-masing pihak, penulis menemukan bahwa, kepentingan pihak masyarakat di sini terkait akses air bersih terutama untuk ibadah dan kebutuhan sehari-hari. Selain itu masyarakat menginginkan adanya jaminan bahwa kejadian serupa tidak kembali terulang karena tanggung jawab atas pengaliran air sudah diambil alih oleh pihak Dinas, maka masyarakat menuntut tanggungjawab tersebut. Terdapat kepentingan dari pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata, memiliki kepentingan dan tanggung jawab dalam mengelola Pariwisata termasuk pasokan air. Selain itu, hubungan dengan masyarakat juga harus dipertahankan untuk keberlangsungan industri Pariwisata khususnya Danau Tolire. Karena dalam pengelolaannya, tentunya tidak bisa lepas dari bantuan masyarakat setempat, konflik yang terjadi jika dibiarkan secara berkepanjangan, akan menimbulkan dampak negatif terhadap citra Dinas Pariwisata itu sendiri.

Dalam prosesnya pada tahap persiapan, strategi yang digunakan dalam proses negosiasi yakni pendekatan win-win solution, yakni solusi yang dihasilkan dari proses negosiasi dapat menguntungkan kedua belah pihak yang berkonflik.

#### b. Kegiatan Negosiasi

Setelah tahap persiapan selesai, proses negosiasi menjadi tahap inti dalam upaya mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Proses ini melibatkan interaksi langsung

antara pihak-pihak yang berkonflik, di mana mereka menyampaikan kepentingan, tuntutan, serta argumentasi masing-masing.

Negosiasi dilaksanakan dengan menghadirkan pihak-pihak yang terlibat yakni perwakilan pihak Dinas Pariwisata dan perwakilan pihak masyarakat yakni beberapa anggota FORMAT (Forum Masyarakat Takome), juga ada pihak penengah yakni Lurah Takome. Hal ini dikarenakan negosiasi dilaksanakan secara tertutup di Kantor Kelurahan Takome, maka yang dihadirkan dalam pertemuan tersebut hanya perwakilan dari masing-masing pihak yang berkonflik.

Setelah dihadirkan pihak-pihak tersebut, proses negosiasi langsung dilaksanakan dengan membuka diskusi yang mana pihak penengah yang menjadi fasilitator untuk diskusi antara dua pihak. Proses tersebut kemudian menghasilkan beberapa kesepakatan berikut:

- 1) Pihak dinas akan segera membayar tunggakan air kepada PAM agar pengaliran air di keempat rumah ibadah bisa segera diproses oleh PAM;
- 2) Masyarakat setuju untuk tidak lagi melakukan aksi boikot di tempat wisata seperti kejadian kemarin yang menyebabkan dampak negatif pada pengelolaan destinasi wisata Danau Tolire dan mengganggu wisatawan yang berkunjung;
- 3) Kedua pihak sepakat untuk berdamai dan kembali melakukan kerja sama untuk pengelolaan wisata Danau Tolire;
- 4) Pengelolaan retribusi masuk tetap di pegang oleh pihak Dinas Pariwisata dengan kesepakatan pengaliran air tidak lagi terhambat;
- 5) Jika kejadian yang sama terulang, maka retribusi masuk wisata Danau Tolire akan diambil alih oleh masyarakat Takome.

Hasil negosiasi tersebut sudah dipertimbangkan oleh kedua pihak dibantu oleh Lurah sebagai pihak penengah. Hasil tersebut dianggap sebagai solusi yang sama-sama menguntungkan bagi kedua pihak. Pihak Dinas mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat dan dapat tetap mengambil alih retribusi masuk wisata Danau Tolire dengan tidak menunggak pembayaran air, dan masyarakat mendapat haknya terhadap pengaliran air di rumah ibadah.

### **3.2.3 Evaluasi**

Evaluasi adalah langkah terakhir dalam rangkaian proses negosiasi menurut Lumumba (2013). Evaluasi berarti hasil dari seluruh rangkaian negosiasi sebelumnya yang telah dilaksanakan, dapat berupa keberhasilan, ketertundaan, ataupun ketidakberhasilan.

Pada negosiasi kali ini, hasil yang didapatkan yakni keberhasilan negosiasi. Para pihak yang berkonflik dapat didamaikan dengan beberapa solusi yang sudah dicapai dan saling menguntungkan, kemudian hasil dari negosiasi tersebut sudah diimplementasikan oleh kedua pihak.

Dari penelitian yang dilakukan, aliran air selama bulan November sampai dengan Januari di keempat rumah ibadah sudah kembali berjalan dan tidak mengalami hambatan semenjak negosiasi dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pihak sudah melaksanakan hasil kesepakatan negosiasi dengan konsisten dan tidak melanggar hasil kesepakatan tersebut. Dengan adanya kesepakatan yang dibuat dan disetujui oleh masing-masing pihak yang berkonflik serta sudah terimplementasikan, maka negosiasi yang dilaksanakan dikatakan berhasil.

### **3.3 Diskusi Temuan Utama**

Penelitian ini mengangkat isu konflik pengelolaan sumber daya air di kawasan wisata Danau Tolire, khususnya menyangkut keputusan aliran air oleh PDAM terhadap empat rumah ibadah di kawasan wisata Danau Tolire Kelurahan Takome. Konflik tersebut bermula dari

tunggakan pembayaran air yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Ternate, sebagaimana dipahami oleh masyarakat berdasarkan hasil pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ketika pasokan air dihentikan tanpa pemberitahuan lebih lanjut, masyarakat merasa hak-haknya sebagai warga negara, sekaligus sebagai pengguna kawasan wisata, diabaikan.

Konflik kemudian mencapai titik puncaknya dalam bentuk aksi boikot jalan menuju kawasan wisata oleh forum masyarakat Takome. Aksi ini dapat dipahami sebagai bentuk tekanan sosial terhadap pemerintah untuk segera memberikan respons dan penyelesaian terhadap permasalahan yang dianggap berlarut-larut. Menariknya, konflik ini tidak semata-mata mencerminkan ketegangan antara masyarakat dan pemerintah, melainkan juga menunjukkan adanya celah dalam koordinasi antarinstansi, terutama antara Dinas Pariwisata dan PDAM.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa belum ada studi sebelumnya yang secara spesifik mengangkat dimensi negosiasi dalam konflik pengelolaan sumber daya air di kawasan wisata. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah untuk memahami bagaimana proses negosiasi dalam konteks lokal bisa berlangsung dalam upaya resolusi konflik sumber daya.

Berbeda dengan penelitian dari Ansori Ansori et al., (2024) yang berjudul “Konflik dan Negosiasi Dalam Organisasi”, ataupun penelitian dari Al-Hasyimy, (2024) yang berjudul “Strategi Negosiasi dalam Menyelesaikan Konflik di Sekolah”, serta penelitian dari Husni et al., (2024) yakni Komunikasi Strategis Lobi Dan Negosiasi Dalam Upaya Peredaman Konflik Agraria Desa Pakel, Banyuwangi, teori negosiasi yang dijelaskan dalam penelitian ini memiliki pola dan cara penyelesaian yang sangat berbeda.

Proses negosiasi yang terjadi menunjukkan pola penyelesaian berbasis komunitas yang melibatkan aktor lokal seperti Lurah sebagai mediator atau pihak netral. Keberadaan Lurah Takome dalam proses mediasi membuktikan pentingnya aktor lokal yang memiliki legitimasi sosial dan administratif untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dan instansi pemerintahan. Negosiasi ini kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa pasokan air akan kembali disalurkan dan bahwa akan ada evaluasi ulang mengenai mekanisme pembiayaan air di kawasan tersebut.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks pengelolaan sumber daya publik yang melibatkan banyak kepentingan, negosiasi tidak hanya menjadi sarana resolusi teknis, melainkan juga menjadi wadah rekonsiliasi sosial dan pembentukan kembali relasi antara masyarakat dan pemerintah. Kasus ini juga menjadi pembelajaran bahwa komunikasi yang terputus antara instansi dapat memicu konflik yang lebih luas, terutama di wilayah yang sensitif seperti kawasan wisata dan ruang ibadah.

#### **IV. KESIMPULAN**

- 1) Konflik pengelolaan sumber daya air yang terjadi dapat dijelaskan melalui teori Galtung (1996) yang disebut segitiga konflik. Yang pertama contradictions (pertentangan), tahap ini yakni awal kejadian yang memicu timbulnya konflik. Akar permasalahan dari konflik ini yakni masalah pemutusan air yang sudah beberapa kali terjadi, pada tahun 2019 dan 2022, kemudian pemutusan kembali dilakukan pada tahun september 2024. Kedua attitudes (sikap) yakni respon yang muncul ketika konflik terjadi. Keluhan yang muncul akibat

konflik ini yakni keluhan dari warga Kelurahan Takome, karena banyak masalah yang timbul dari pemutusan air ini, salah satunya masyarakat menjadi kesulitan dalam beribadah. Ketiga behaviors (perilaku), yakni tindakan nyata yang dilakukan atau puncak dari konflik yang terjadi. Dalam kasus ini, tindakan nyata yang muncul yakni adanya aksi pemboikotan dari masyarakat Kelurahan Takome di jalan masuk menuju wisata Danau Tolire. Tindakan ini kemudian menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pengunjung wisata dan retribusi masuk wisata Danau Tolire.

- 2) Dari konflik tersebut, penyelesaian konflik dilakukan dengan negosiasi. Dari analisis yang dilakukan penulis menggunakan teori negosiasi oleh Lumumba (2013), negosiasi konflik dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama pra negosiasi, tahap ini menjelaskan mengenai kesepakatan awal dan kesepakatan prosedur yang dilakukan sebelum negosiasi dilakukan, kesepakatan tersebut yakni negosiasi akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara kedua pihak, dan negosiasi dilaksanakan di Kantor Lurah Takome dan dilakukan secara tertutup dengan menghadirkan perwakilan dari beberapa pihak. Kedua proses negosiasi, tahap ini menjelaskan persiapan negosiasi dan kegiatan negosiasi. Untuk persiapan negosiasi yakni mendapat kesediaan dari masing-masing pihak untuk melaksanakan negosiasi dan menentukan permasalahan dan strategi negosiasi. Sedangkan tahap kegiatan negosiasi yakni tahap berjalannya negosiasi dan hasil kesepakatan dari negosiasi yang dilakukan, yang mana negosiasi dilakukan secara tertutup dan menghadirkan perwakilan dari pihak-pihak yang berkonflik serta ada pihak penengah yakni Lurah Takome. Ketiga evaluasi, yakni tahap terakhir dari negosiasi berupa hasil dari seluruh rangkaian negosiasi yang telah dilakukan. Hasil dari negosiasi yang dilakukan yaitu keberhasilan negosiasi. Para pihak yang berkonflik didamaikan dengan beberapa kesepakatan dan disetujui oleh masing-masing pihak. Kemudian semenjak negosiasi dilaksanakan, aliran air di keempat rumah ibadah kembli berjalan lancar dan tidak ada masalah.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui sebagai bagian dari proses ilmiah yakni keterbatasan lokasi dan kasus, penelitian ini hanya berfokus pada satu kasus konflik di kawasan wisata Danau Tolire, khususnya yang melibatkan masyarakat Kelurahan Takome dan Dinas Pariwisata Kota Ternate. Dengan ruang lingkup yang terbatas, temuan dalam penelitian ini tidak dapat digeneralisasi ke seluruh konflik pengelolaan sumber daya air di kawasan wisata lainnya, baik di Ternate maupun di daerah lain.

Selanjutnya terdapat keterbatasan dalam pendekatan penelitian, yang mana meskipun pendekatan ini efektif dalam menggali dinamika konflik dan proses negosiasi secara mendalam, pendekatan kualitatif tidak memungkinkan pengukuran yang bersifat kuantitatif atau statistik mengenai persepsi masyarakat secara lebih luas. Hasilnya lebih bersifat interpretatif dan kontekstual.

Terakhir, terdapat keterbatasan waktu penelitian yang relatif singkat membatasi peneliti dalam melakukan observasi lanjutan terhadap proses pasca-negosiasi. Beberapa perubahan yang mungkin terjadi setelah negosiasi tidak sepenuhnya terdokumentasi dalam penelitian ini.

## Arah Masa Depan Penelitian

Melalui keterbatasan yang ada, penelitian ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan luas, antara lain:

- 1) Studi Evaluatif terhadap Hasil Negosiasi  
Penelitian lanjutan dapat dirancang sebagai studi evaluatif jangka menengah/panjang yang mengamati sejauh mana kesepakatan hasil negosiasi benar-benar diimplementasikan, serta dampaknya terhadap relasi sosial, pelayanan publik, dan stabilitas kawasan wisata.
- 2) Integrasi Pendekatan Sosial-Ekologis  
Konflik pengelolaan air juga dapat dilihat dari perspektif ekologi sosial (socio-ecological conflict), yang mengaitkan antara kebutuhan masyarakat, kapasitas infrastruktur, dan keberlanjutan lingkungan kawasan wisata.
- 3) Kajian Peran Aktor Netral dalam Negosiasi Lokal  
Temuan tentang peran Lurah sebagai penengah membuka ruang penelitian baru mengenai pentingnya aktor netral lokal dalam menyelesaikan konflik sumber daya. Studi berikutnya dapat lebih fokus pada strategi, legitimasi, dan efektivitas mediasi oleh pemimpin lokal dalam berbagai bentuk konflik kebijakan publik.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Ternate beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, kepada Lurah Kelurahan Takome dan masyarakat dan Forum Masyarakat Takome yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini dan membantu penulis dalam menyelesaikan dan menyukseskan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hasyimy, A. (2024). *Strategi Negosiasi dalam Menyelesaikan Konflik di Sekolah*. *Jurnal Media Hukum Dan Pendidikan*, 15(1), 37–48. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v34i1.218>
- Ansori Ansori, Asi Angelia Safitri, Nur Adilla, & Sigit Hardi Ramadhani. (2024). *Konflik dan Negosiasi dalam Organisasi*. *CiDEA Journal*, 3(1), 55–64. <https://doi.org/10.56444/cideajournal.v3i1.1818>
- Ariyanto, L. (2022). *Alokasi Air Das Sekampung Sebagai Upaya Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan*. *JICE (Journal of Infrastructural in Civil Engineering)*, 3(01), 1. <https://doi.org/10.33365/jice.v3i01.1483>
- Asiah, S. (2017). *Manajemen Konflik Teori dan Aplikasi* (N. Husain (ed.)). PUSTAKA CENDEKIA.
- Atmanegara, W., & Ahmadi. (2024). *Konflik dan Perhunya Negosiasi dalam Organisasi*. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 8(1), 55–64. <https://doi.org/10.56444/cideajournal.v3i1.1818>
- Fan, Z., Fu, X., & Zhao, X. (2025). *A Bargaining with Negotiation Cost for Water Use and Pollution Conflict Management*. *Sustainability (Switzerland)*, 17(1). <https://doi.org/10.3390/su17010119>
- Fauzi, N. B., Sumarni, L., Esfandiary, S., Balqis, K., & Aprihatno, A. (2024). *Strategi Negosiasi*

- dalam Menyelesaikan Konflik Organisasi. *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan*, 34(1), 38–46. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v34i1.218>
- Galtung, J. (1996). *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. SAGE Publications. <https://doi.org/https://doi.org/10.4135/9781446221631>
- Husni, M. R., Sanggoleo, M. F., Doli H., S., S., M., & Noor H., M. T. (2024). *Komunikasi Strategis Lobi dan Negosiasi dalam Upaya Peredaman Konflik Agraria Desa Pakel, Banyuwangi. Majalah Ilmiah METHODA*, 14(2), 194–199. <https://doi.org/10.46880/methoda.vol14no2.pp194-199>
- Jeddawi, H. M. (2011). *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*. Kreasi Total Media.
- Kaisupy, D. A., & Maing, S. G. (2021). *Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(1), 82. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i1.27056>
- Katz, D., & Nagabhatla, N. (2023). *Damming Disputes: Conflict Prevention in Water Management. International Scientific Journal*, 15, 24–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/w15132476>
- Labolo, M. (2015). *Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal*. Ghalia Indonesia.
- Lucy, B., & Andreas, N. (2018). *Tourism in Bali at the Interface of Resource Conflicts, Water Crisis and Security Threats. The Tourism-Disaster-Conflict Nexus*, 19, 33–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/S2040-726220180000019002>
- Lumumba, P. (2013). *Negosiasi Dalam Hubungan Internasional*. Graha Ilmu.
- Mahsya, F. A. (2024). *Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Strategi Promosi Tempat Wisata Di Kota Ternate Oleh Dinas Pariwisata Kota Ternate (Studi Analisis Deskriptif Kualitatif Pada Akun Instagram @Wonderfulternate)* (Vol. 15, Issue 1). Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia.
- Muslim, K., & Prayoga, H. Y. (2024). *Analisis Teori Konflik : Strategi Negosiasi Sebagai Solusi Efektif Dalam Manajemen Organisasi Di SD IT An-Nahar. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8. <https://doi.org/10.30821>
- Noviyanti, V., & Shawwir, M. (2022). *Konflik Antar Warga Di Kecamatan Pulau Ternate (Studi Tentang Negosiasi Tapal Batas Antara Kelurahan Sulamadaha Dan Kelurahan Takome). Journal Government of Archipelago*, 3, 35.
- Qal. (2024). *Gegara Dinas Pariwisata, Layanan Air di Masjid dan Musala Takome, Ternate Diputuskan PDAM*. halmaherapost. [https://halmaherapost.com/2024/09/22/gegara-dinas-pariwisata-layanan-air-di-masjid-dan-musala-takome-ternate-diputuskan-pdam/#google\\_vignette](https://halmaherapost.com/2024/09/22/gegara-dinas-pariwisata-layanan-air-di-masjid-dan-musala-takome-ternate-diputuskan-pdam/#google_vignette)
- Salah, F., Zulfaidi, & Puarada, F. (2024). *Resolusi Konflik Perebutan Mayat: Negosiasi Antaragama di Sentani, Papua. Jurnal Sosial Keagamaan*, 5, 158–178. <https://doi.org/10.53491/porosnim.v5i2.1317>

Simangunsong, F. (2017). *Metode Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.

Simarmata, M. J. S., Rizaldy, F. R., Sihombing, L. Y. L., & Amiruddin, M. (2024). *Strategi Lobi dan Negosiasi dalam Penyelesaian Konflik Sosial: Studi Kasus Penolakan Pembangunan Gereja HKBP di Cilegon, Indonesia*. *Indonesian Culture and Religion Issues*, 1(2), 12. <https://doi.org/10.47134/diksima.v1i2.18>

Weningtyas, A., & Widuri, E. (2022). *Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Modal Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 5(1), 129–144. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6074>

